

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia - Penulis UI
TEMA : Evluasi 2007 dan Perspektif 2008
Raihan Besar Diplomasi Internasional RI
SURAT KABAR/MAJALAH : Indo Pos

Hari Jumat Tanggal 4 Bulan Desember Tahun 2008 Halaman 4 Kol 2 - 5

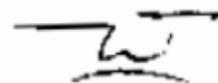
RINGKASAN

Bantarto Bandoro menulis bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengawali 2007 dengan komitmen akan tetap menjadi bagian penting dalam kerja sama internasional untuk mengatasi masalah – masalah internasional. Dalam forum – forum multilateral, baik regional maupun global, Indonesia membuktikan diri sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya – upaya internasional untuk menyelesaikan masalah internasional. Di forum PBB, Indonesia dicatat sebagai salah satu penggerak penyelesaian masalah Timur Tengah, perubahan iklim dan masalah lainnya. Hadirnya Presiden Yudhoyono dalam forum – forum multilateral memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peran dan posisi internasional Indonesia

CATATAN:

Evaluasi 2007 dan Perspektif 2008 (15-Habis)

Raihan Besar Diplomasi Internasional RI



PEMERINTAHAN Susilo Bambang Yudhoyono mengawali 2007 dengan komitmen akan tetap menjadi bagian penting dalam kerja sama internasional untuk mengatasi masalah-masalah internasional. Pemerintah juga sadar hubungan internasional Indonesia tidak bisa dilihat terpisah dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri Indonesia.

Cris Brown melihat politik luar negeri sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Dari definisi itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa politik luar negeri sangat terkait erat dengan kepentingan nasional suatu negara.

Dalam konteks itu, apa yang menjadi hirauan publik di dalam negeri harus tecermin dalam hubungan internasional dan politik luar negeri RI. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Karena itu, pemerintah merasa perlu untuk tetap peka terhadap perubahan-perubahan eksternal Indonesia.

Dalam salah satu pidatonya pada 2007, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia akan menjadi lebih fleksibel terhadap politik dunia tanpa mengorbankan nilai-nilai dan kepentingan nasional Indonesia.

Apa yang dilakukan Indonesia dalam hubungan luar negerinya selama 2007, dan tahun-tahun sebelumnya, selalu didasarkan atas kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu bukan hanya menjadi dasar, tetapi juga panduan mengenai apa yang harus diraih oleh diplomasi internasional Indonesia.

Raihan Besar

Tahun 2007 mencatat raihan besar dan berarti dalam diplomasi internasional Indonesia. Dalam forum-forum multilateral, baik regional maupun global, Indonesia membuktikan diri sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya-upaya internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Mulai isu Palestina dan Israel sampai isu Iraq, Korea Utara, Lebanon, Darfur, Kosovo dan isu-isu regional, seperti pembentukan komunitas Asia Timur, isu Myanmar, Indonesia mencoba menunjukkan peran atau setidaknya membawa isu-isu tersebut ke meja perundingan (*The Jakarta Post*, 28 Desember 2007).

Di forum PBB, Indonesia dicatat sebagai salah satu penggerak penyelesaian masalah Timur Tengah, perubahan iklim dan masalah-masalah lainnya yang menjadi hirauan masyarakat internasional. Keanggotaan tidak tetap Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB juga membuktikan kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran aktif internasional Indonesia.

Hadirnya Presiden Yudhoyono dalam forum-forum multilateral memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi peran dan posisi internasional Indonesia. Bukan hanya itu. Kehadirannya dan gagasan-gagasan baru Indonesia juga membuktikan kredibilitas internasional Indonesia.

Oleh:

Bantarto Bandoro

Peneliti senior
pada CSIS dan
dosen
Pascasarjana
FISIP Universitas
Indonesia, Jakarta



Indonesia ha-
rus mampu
memengaruhi
perkembangan pada
tingkat global dan regio-
nal dengan memobili-
sasi apa pun sumber
daya yang dimilikinya.”

menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari diplomasi internasional Indonesia. Kemitraan strategis Indonesia dengan anggota masyarakat internasional lainnya pada 2008 diperkirakan semakin ekstensif selama kemitraan tersebut dianggap menguntungkan Indonesia.

Tahun 2008 dan tahun-tahun di atas itu dipastikan akan menjadi tahun-tahun yang penuh tantangan untuk Indonesia, bukan saja karena dunia akan semakin terglobalisasi, tetapi juga karena Indonesia akan menyaksikan perubahan-perubahan domestik sejalan dengan Pemilu 2009. Dalam konteks tersebut, hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia terlalu penting untuk diabaikan begitu saja karena ia merupakan bagian penting dari kebijakan nasional.

Artinya, untuk tahun-tahun ke depan pemerintah Indonesia harus mengelola hubungan luar negerinya sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi faktor yang mendukung kemakmuran dan stabilitas domestik. Pada 2008 Indonesia harus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi, keamanan, kemakmuran, dan stabilitas bangsa. Isu-isu lunak tampaknya akan tetap menjadi agenda internasional 2008 dan tahun-tahun di atas itu.

Jika Indonesia ingin politik luar negerinya dilihat memberi manfaat kepada rakyatnya, konsisten dengan keterikatan pada multilateralisme dan mengedepankan kepentingan masyarakat internasional lainnya, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih fokus dan proaktif. Hanya dengan cara demikian, Indonesia akan memperoleh penghargaan lebih tinggi lagi dari masyarakat internasional dan domestik atas kontribusinya pada penyelesaian masalah-masalah internasional.

Indonesia akan memasuki 2008 dengan kepercayaan yang tinggi karena keberhasilannya dalam diplomasi internasional selama ini. Tapi, Indonesia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perubahan-perubahan akan terus mewarnai 2008. Karena itu, Indonesia perlu melakukan apa yang oleh James Rosenau (1981) disebut sebagai adaptasi positif, yaitu Indonesia terus-menerus terlibat secara dalam dan aktif pada masalah-masalah internasional.

Dalam lingkungan internasional yang terus berubah, seperti diperlukan semacam konsensus perdamaian. Stabilitas dalam negeri sangat bergantung pada perkembangan di lingkungan eksternal Indonesia. Itu berarti keputusan-keputusan politik luar negeri Indonesia pada tahun-tahun mendatang sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Mampu mengantisipasi perubahan global di kemudian hari, sekalipun dampak negatifnya sulit dicegah.

Dalam konteks itu, Indonesia harus mampu memengaruhi perkembangan pada tingkat global dan regional dengan memobilisasi apa pun sumber daya yang dimilikinya. Tahun 2008 akan jadi tahun penuh ujian ketika publik domestik kian sadar hubungan internasional dan politik luar negeri Indonesia terkait erat dengan harga diri bangsa, posisi, dan peran Indonesia

menjadi salah satu promotor utama penyelesaian masalah-masalah regional. Pengakuan yang semakin kuat dari negara-negara anggota ASEAN terhadap peran regional Indonesia memberi modal bagi Indonesia untuk memperkuat posisi regionalnya dan menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah-masalah baru regional.

Di ASEAN, Indonesia, tidak seperti ketika mengalami krisis ekonomi akhir 1990-an, banyak mengambil prakarsa regional yang kemudian menjadi bagian penting dari kebijakan regional ASEAN. Indonesia kini memang sudah berubah sejalan dengan proses demokratisasi. Indonesia juga menyaksikan dunia yang mengalami transformasi dalam peradaban manusia serta tatanan dunia yang didasarkan atas nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar liberal. Perubahan-perubahan demikian mengharuskan Indonesia untuk beradaptasi, baik secara domestik maupun internasional.

Dalam konteks adaptasi itulah, Indonesia pada 2007 banyak memprakarsai pertemuan-pertemuan internasional dan mengambil kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan domestik Indonesia. Multilateralisme kini diakui merupakan norma dalam hubungan internasional kontemporer. Karena itu, Indonesia jeli melihat setiap kemungkinan yang ditawarkan proses multilateralisme tersebut, terutama untuk memajukan kepentingan nasional dan global baru Indonesia.

Keputusan Indonesia menjadi bagian dari upaya multilateral untuk mengatasi, antara lain, masalah penyebaran senjata nuklir, terorisme internasional, dan perubahan iklim menunjukkan bahwa Indonesia berpihak kepada cara-cara multilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional. Tahun 2007 secara jelas menunjukkan komitmen Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari kolaborasi internasional guna menciptakan lingkungan global yang lebih stabil dan aman. Tentu tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Menurut Presiden Yudhoyono, yang penting adalah memulihkan harga diri Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Semboyan Presiden Yudhoyono "mengarungi lautan yang bergolak" (*navigating the turbulence ocean*) adalah refleksi konkret diplomasi internasional Indonesia untuk meraih sebanyak-banyaknya keberhasilan di panggung internasional.

Tahun 2007 juga diwarnai pemikiran untuk menerapkan kekuatan lunak dalam diplomasi internasional Indonesia. Kekuatan lunak itu oleh Indonesia diyakini sebagai kekuatan yang dapat menawarkan ruang yang lebih

salah internasional Indonesia.

Dalam diplomasi internasional, penerapan kekuatan lunak saja dianggap tidak cukup. Kombinasi antara kekuatan lunak dan kekuatan keras, misalnya kapabilitas ekonomi, bisa memberikan prospek lebih baik bagi Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional.

Keberhasilan diplomasi internasional Indonesia di forum multilateral cukup nyata. Apresiasi yang tinggi terhadap peran aktif Indonesia di forum internasional bukan hanya datang dari masyarakat internasional, tetapi juga dari anggota badan legislatif Indonesia (DPR). Dalam isu Timur Tengah, misalnya, anggota DPR mendesak Indonesia menggunakan haknya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk melakukan terobosan-terobosan baru.

Perhatian DPR dan publik terhadap isu-isu luar negeri Indonesia selama 2007 begitu besar sehingga pemerintah Indonesia mau tidak mau juga harus memperhatikan sentimen-sentimen yang berkembang dalam masyarakat. Bagaimanapun, apa yang dijalankan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari hubungan luar negerinya akan memberikan dampak terhadap kondisi domestik Indonesia. Tidak pernah sebelumnya kita menyaksikan keterlibatan publik yang amat luas dalam memengaruhi, kalau tidak menentukan, keputusan-keputusan luar negeri seperti yang kita saksikan selama 2007.

Publik sadar bahwa masalah-masalah luar negeri tidak melulu menjadi domain departemen luar negeri. Publik juga memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan luar negeri.

Dalam konteks itulah, pada tataran bilateral, pemerintah Indonesia banyak dikecam publik karena cara-cara dalam menangani masalah-masalah bilateral. Kalau pada tataran multilateral Indonesia banyak disanjung publik domestik, pada tataran bilateral, pemerintah justru dikritik karena caranya menyelesaikan masalah bilateral dianggap mengorbankan kepentingan nasional.

Selama 2007, publik menyaksikan serangkaian isu bilateral Indonesia, misalnya, masalah TKI di Malaysia, perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura, dan hubungan Indonesia-Australia. Apa yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah-masalah itu memberi kesan bahwa Indonesia di mata publik domestik tak memiliki determinasi untuk membuktikan sebagai negara berdaulat.

Dilihat dari perspektif demikian, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia secara bilateral tidak membawa sukses, setidaknya di mata publik, sebesar yang ia raih dalam forum multilateral. Meski demikian,